

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 07 TAHUN 2013
TENTANG
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

JENIS FORMULIR PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

1. Model B : Surat Pencalonan Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/DPRD Kota.
2. Model BA : Daftar Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
3. Model BB : Surat Pernyataan tentang status bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang meliputi WNI yang telah berumur 21 tahun atau lebih, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia serta setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
4. Model BB-1 : Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
5. Model BB-2 : Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang berakhirnya masa menjalani pidana bagi bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/ Kota yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
6. Model BB-3 : Surat Pernyataan tentang kesediaan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih sebagai Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota.

7. **Model BB-4** : Surat Pernyataan tentang kesediaan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
8. **Model BB-5** : Surat Pernyataan pengunduran diri bakal calon dari keanggotaan DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/ Kota kepada pimpinan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
9. **Model BB-6** : Surat Pernyataan pengunduran diri bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari keanggotaan KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota/PPK/PPS/PPLN/KPPS/KPPSLN/Bawaslu/Bawaslu Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/ Kota/ Panwascam/ Panwaslap.
10. **Model BB-7** : Surat Pernyataan pengunduran diri bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.
11. **Model BB-8** : Surat Pernyataan tentang kesediaan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, PPAT atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan
12. **Model BB-9** : Surat Pernyataan tentang kesediaan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara.
13. **Model BB-10** : Surat Pernyataan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) daerah pemilihan.

14. Model BB-11 : Daftar riwayat hidup bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota.
15. Model BB-12 : Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi.
16. Model BB-13 : Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi.
17. Model BB-14 : Berita Acara Hasil Verifikasi Syarat Calon Pengganti
18. Model BC : Daftar Calon Sementara Anggota DPR
19. Model BC1 : Daftar Calon Tetap Anggota DPR
20. Model BC2 : Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan Anggota DPR
21. Model BD : Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi
22. Model BD1 : Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi
23. Model BD2 : Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan Anggota DPRD Provinsi
24. Model BE : Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota
25. Model BE1 : Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota
26. Model BE2 : Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

MODEL B

Contoh :

**SURAT PENCALONAN**

Nomor :

Partai

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/ Kota*) Tahun 2014, bersama ini Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/ Provinsi/Kabupaten/Kota *) : berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM/Keputusan Dewan Pimpinan Pusat/Keputusan Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi *) Nomor : tanggal ... tahun yang beralamat di Nomor Telepon/*Faximile*, mengajukan pendaftaran bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/ Kota *) untuk Provinsi/Kabupaten/Kota *) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Jumlah Daerah Pemilihan sebanyak (.....), meliputi :

NO	DAERAH PEMILIHAN	ALOKASI KURSI	JML BAKAL CALON	JML LAKI/ PEREMPUAN	
				LAKI	PEREM P
dst					

2. Nama-nama bakal calon untuk setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, merupakan hasil seleksi secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik.
3. Surat pencalonan anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota*), dilampiri :
 - a. Daftar bakal calon yang masing-masing disusun untuk setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam formulir Model BA.

- b. Surat Keterangan dan Surat Pernyataan untuk pemenuhan persyaratan masing-masing bakal calon sebagaimana tercantum dalam formulir Model BB sampai dengan Model BB-11.
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia atau paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.
- d. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik Peserta Pemilu.
- e. Bukti kelulusan pendidikan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, program Paket C atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- f. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih atau surat keterangan telah terdaftar sebagai pemilih dari Ketua PPS.
- g. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasarakatan bagi bakal calon yang telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dilampiri:
 - 1) surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana dan bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut.
 - 2) surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.
- h. Surat Keterangan dari Dokter, Puskesmas atau Rumah Sakit pemerintah yang menerangkan kondisi kesehatan jasmani dan rohani masing-masing bakal calon.
- i. Surat Keterangan dari dokter rumah sakit yang menerangkan kondisi bakal calon tidak terkena/bebas narkoba.
- j. Surat Keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia.
- k. Surat Keputusan Pemberhentian atau surat keterangan persetujuan pengunduran diri dari pejabat yang berwenang bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Penyelenggara Pemilu, DKPP, Panitia Pemilihan, Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- l. Pas foto berwarna terbaru masing-masing bakal calon dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar disertai *softfile*.

Demikian surat pencalonan ini diajukan untuk memenuhi persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan yang telah dilegalisasi, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nomor Urut, Nama Partai
Politik serta Tanda Gambar
Partai Politik
(5 cm x 5 cm)

....., 2013

Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/
Provinsi/Kabupaten/Kota *)
Partai

Ketua Umum/Ketua
atau sebutan lain *)

(.....)

Sekretaris Jenderal/Sekretaris
atau sebutan lain *)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

MODEL BA

Contoh :



**DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/
DPRD KABUPATEN/DPRD KOTA*)**

1. Nama Provinsi/Kabupaten/Kota*) :
2. Nama Daerah Pemilihan :

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Nomor Dan Nama Partai Politik serta Tanda Gambar Partai Politik </div>				
NO URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB./KOTA./KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1.	Pas Foto 3x4			
2.	Pas Foto 3x4			
3.	...			

Demikian susunan daftar bakal calon ini yang merupakan lampiran surat pencalonan diajukan untuk memenuhi persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan yang telah dilgalisasi, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2013

Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/

Provinsi/Kabupaten/Kota *)

Partai

**Ketua Umum/Ketua
atau sebutan lain *)**

**Sekretaris Jenderal/Sekretaris
atau sebutan lain *)**

(.....)

(.....)

Keterangan :

1. Untuk masing-masing daerah pemilihan dibuat satu daftar bakal calon (Model BA).
2. *) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH :



MODEL BB

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur : / tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya :

1. Warga Negara Republik Indonesia, umur.....
(.....) tahun;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan taat menjalankan kewajiban agama;
3. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
4. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

.....,
2013
 Materai Yang menyatakan
)

Mengetahui,

Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/
 Provinsi/Kabupaten/Kota *)

Partai

Ketua Umum/Ketua
atau sebutan lain)*

(.....)

Sekretaris Jenderal/Sekretaris
atau sebutan lain)*

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH :

MODEL BB-1



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 7. Nama lengkap :
- 8. Tempat dan tanggal lahir/umur : /..... tahun;
- 9. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
- 10. Agama :
- 11. Pekerjaan :
- 12. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih **).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

.....,
2013
 Materai Yang menyatakan
)

Mengetahui,
 Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/
 Provinsi/Kabupaten/Kota *)
 Partai

Ketua Umum/Ketua
 atau sebutan lain)*
 (.....)

Sekretaris Jenderal/Sekretaris
 atau sebutan lain *)
 (.....)

Keterangan :

- 1. *) Coret yang tidak diperlukan.
- 2. **) Bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan (Model BB-3).

CONTOH :

MODEL BB-2

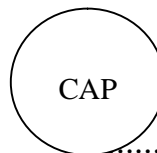
SURAT KETERANGAN**)

Lembaga Pemasyarakatan menerangkan bahwa :

1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur : /..... tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan telah dinyatakan bebas sejak tanggal

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.



.....,
2013
 Kepala Lembaga
 Pemasyarakatan

Keterangan :

- *) Coret yang tidak diperlukan.
- **) Bagi bakal calon yang tidak pernah dipidana penjara dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari bakal calon yang bersangkutan (Model BB-1).

CONTOH :

MODEL BB-3

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur : / tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia untuk bekerja sepenuh waktu, dan bersedia untuk tidak menekuni pekerjaan lain apapun yang dapat mengganggu tugas dan kewajibannya sebagai Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

.....,

.....2013

Yang menyatakan

Materai

.....)

Mengetahui,

Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/
Provinsi/Kabupaten/Kota *)
Partai

Ketua Umum/Ketua
atau sebutan lain *)

(.....)

Sekretaris Jenderal/Sekretaris
atau sebutan lain *)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

MODEL BB-4

CONTOH :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur : / tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri saya sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas/Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/badan lain*) yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara (APBN/APBD).

Surat pernyataan pengunduran diri saya ini dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian dan/atau surat keterangan bahwa pengunduran diri saya telah diterima, diteruskan dan diproses oleh instansi/ lembaga atau unit kerja pada instansi/lembaga dimana saya diangkat bekerja.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

.....,
2013
 Materai Yang menyatakan
)

Mengetahui,
 Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/
 Provinsi/Kabupaten/Kota *)
 Partai

Ketua Umum/Ketua
 atau sebutan lain *)

(.....)

Sekretaris Jenderal/Sekretaris
 atau sebutan lain *)

(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan.
2. Formulir ini dipergunakan bagi bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas/Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/badan lain.

CONTOH :

MODEL BB-5



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur : / tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak akan menarik pengunduran diri saya sebagai Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *)

Surat pernyataan pengunduran diri ini dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian dan/atau surat keterangan bahwa pengunduran diri saya telah diterima, diteruskan dan telah diproses melalui pimpinan DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

.....,2013

Yang menyatakan

Materai)

Mengetahui,
 Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/
 Provinsi/Kabupaten/Kota *)
 Partai

Ketua Umum/Ketua
 atau sebutan lain *)
 (.....)

Sekretaris Jenderal/Sekretaris
 atau sebutan lain *)
 (.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH :

MODEL BB-6

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur : / tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya mengundurkan diri dan tidak akan menarik pengunduran diri saya sebagai Anggota KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota/ DKPP/Bawaslu/Bawaslu Provinsi /Panwaslu Kabupaten/Kota/ PPK/PPLN, PPS, KPPS/KPPSLN serta Panwascam dan Panwaslap *).

Surat pernyataan ini dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian dan/atau surat keterangan bahwa pengunduran diri saya telah diterima, diteruskan dan diproses oleh instansi/pejabat yang berwenang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Materai

....., 2013

Yang menyatakan

.....)

Mengetahui,

Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/
Provinsi/Kabupaten/Kota *)
Partai

Ketua Umum/Ketua
atau sebutan lain *)

(.....)

Sekretaris Jenderal/Sekretaris
atau sebutan lain *)

(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan.
2. Formulir ini diperuntukkan bagi bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai Anggota KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota/PPK/PPLN, PPS, KPPS/KPPSLN, Bawaslu/Bawaslu Provinsi /Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwascam/Panwaslap.

CONTOH :

MODEL BB-7



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat dan tanggal lahir/umur : / tahun;
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri saya sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa*).

Surat pernyataan ini dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian dan/atau surat keterangan bahwa pengunduran diri saya telah diterima, diteruskan dan diproses oleh instansi/pejabat yang berwenang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i angka 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

.....,
.....2013



Yang menyatakan

(.....)

Mengetahui,
**Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/
Provinsi/Kabupaten/Kota *)**
Partai

**Ketua Umum/Ketua
atau sebutan lain *)**
(.....)

**Sekretaris Jenderal/Sekretaris
atau sebutan lain *)**
(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan.
2. Formulir ini diperuntukkan bagi bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa.

CONTOH :

MODEL BB-8



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur : /..... tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia untuk tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik, Advokat/Pengacara, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara (APBN/APBD) serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota *).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

.....,
.....2013

Yang menyatakan

(Meterai)

Mengetahui,
Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/
Provinsi/Kabupaten/Kota *)
Partai

Ketua Umum/Ketua
atau sebutan lain *)
(.....)

Sekretaris Jenderal/Sekretaris
atau sebutan lain *)
(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH :

MODEL BB-9

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur : / tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara (APBN/APBD).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

.....,
.....2013

Meterai

Yang menyatakan

(.....)

Mengetahui,

Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/
Provinsi/Kabupaten/Kota *)
Partai

Ketua Umum/Ketua
atau sebutan lain *)

(.....)

Sekretaris Jenderal/Sekretaris
atau sebutan lain *)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH :

MODEL BB-10



**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR/
DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/DPRD KOTA*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir/umur : /..... tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya kesediaan saya untuk :

1. Dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik :
 - a. Nama Partai Politik :
 - b. Untuk 1 (satu) lembaga perwakilan : DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota*).
2. Dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan :
 - a. Nama daerah pemilihan :
 - b. Menyetujui penempatan pada nomor urut (.....) dalam Daftar Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota*) (Model BA).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRDKabupaten/DPRD Kota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf o dan huruf p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

.....,
.....2013

Yang menyatakan



(.....

Mengetahui,
Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/
Provinsi/Kabupaten/Kota *)
Partai

Ketua Umum/Ketua
atau sebutan lain *)

(.....

Sekretaris Jenderal/Sekretaris
atau sebutan lain *)

(.....

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

CONTOH :

MODEL BB-11



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/DPRD KOTA*)**

Pas Foto
Bakal
calon
4 x 6

1. Nomor Urut Partai Politik :
2. Nama Partai Politik :
3. Daerah Pemilihan :
4. Nomor urut bakal calon :

5. Nomor Induk Kependudukan :
6. Nama lengkap :
7. Tempat/tanggal lahir/Umur :
8. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
9. Agama :
10. Status Perkawinan : Kawin/pernah kawin/belum kawin *)
 - a. Nama Istri/Suami *) :
 - b. Jumlah anak :

11. Alamat Tempat Tinggal :
- RT/sebutan lain :
- RW/sebutan lain :
- Kelurahan/Desa*) :
- Kecamatan/Distrik :
- Kabupaten/Kota :
- Provinsi :

12. Riwayat pendidikan **) : a.
- b. dst.....
13. Kursus/Diklat yang pernah diikuti: a.
- b. dst
14. Riwayat organisasi***) : a.
- b. dst
15. Riwayat pekerjaan ****) : a.
- b. dst
16. Tanda penghargaan : a.

17. Riwayat Perjuangan : b. dst
 : a.
 b. dst

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan saya bersedia/tidak bersedia*) untuk dipublikasikan kepada masyarakat.

.....,
2013
 yang menyatakan
 Materai
 (.....)

Mengetahui,
 Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat/
 Provinsi/Kabupaten/Kota *)
 Partai

Ketua Umum/Ketua
 atau sebutan lain *)
 (.....)

Sekretaris Jenderal/Sekretaris
 atau sebutan lain *)
 (.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan.
2. **) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/ perguruan tinggi dan tahun kelulusan.
3. ***) Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu menjadi anggota.
4. ****) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/ nama instansi/ lembaga/ / nama kesatuan dalam TNI/Polri,

MODEL BB-12

CONTOH :



**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BAKAL CALON ANGGOTA
DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)**

Pada hari ini tanggal bulan..... Tahun dua ribu tiga belas, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota..... *) telah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota *) dari Partai dengan jumlah daerah pemilihan sebanyak Adapun rincian berkas sebagai berikut :

1. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua atau dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris atau sebutan lainnya (Model B).
2. jumlah bakal calon untuk setiap daerah pemilihan paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi (Model BA).
3. jumlah dan persentase keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk setiap daerah pemilihan.
4. penempatan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang bakal calon perempuan dari setiap 3 (tiga) orang bakal calon.
5. kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi masing-masing bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota *), yaitu :
 - m. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia atau paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.
 - n. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik Peserta Pemilu.
 - o. Bukti kelulusan pendidikan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, program Paket C atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
 - p. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih atau surat keterangan telah terdaftar sebagai pemilih dari Ketua PPS.
 - q. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bagi bakal calon yang telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dilampiri:
 - 1) surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana dan bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut.
 - 2) surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.
 - r. Surat Keterangan dari Dokter, Puskesmas atau Rumah Sakit pemerintah yang menerangkan kondisi kesehatan jasmani dan rohani masing-masing bakal calon.
 - s. Surat Keterangan dari dokter rumah sakit yang menerangkan kondisi bakal calon tidak terkena/bebas narkoba.
 - t. Surat Keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia.
 - u. Surat Keputusan Pemberhentian atau surat keterangan persetujuan pengunduran diri dari pejabat yang berwenang bagi kepala daerah, wakil

kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Penyelenggara Pemilu, DKPP, Panitia Pemilihan, Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Hasil rekapitulasi kelengkapan administrasi bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota *) sebagai berikut :

Contoh :

NO	DAPI L	JUMLA H KURSI	JUMLA H BAKAL CALON	30% KETERWAKILAN PEREMPUAN	PENEMPATAN 3 ORANG BAKAL CALON	KETERANGAN
1	NAD 1	3	3	1	MS	MS
2	NAD 2	4	3	1	TMS	TMS
3	dst					

Adapun rincian hasil verifikasi administrasi untuk masing-masing bakal calon sebagai berikut :

Contoh

NO	FORMULIR/SURAT KETERANGAN	NOMOR URUT BAKAL CALON											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	BB	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS
2	BB-1	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS
3	BB-2	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS
4	BB-3	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS
5	BB-4	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS
6	BB-5	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS
7	BB-6	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS
8	BB-7	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS
9	BB-8	MS	MS	TMS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS
10	BB-9	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS
11	BB-10	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS
12	BB-11	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS
13	KTP	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS
14	KTA	MS	TMS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS
15	IJAZAH	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS
16.	Surat keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Surat keputusan pemberhentian atau surat keterangan persetujuan pengunduran diri	-	MS	-	-	-	-	-	-	MS	-	-	-

18.	Surat pernyataan yang bersangkutan mantan narapidana dan bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut.	-	MS	-	-	-	-	-	-	MS	-	-	-
19.	Surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.	-	MS	-	-	-	-	-	-	MS	-	-	-
	PEMENUHAN SYARAT	MS	TMS	TMS	MS	MS	TMS	MS	MS	MS	MS	MS	MS

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk Partai Politik Peserta Pemilu;
2. Satu rangkap untuk KPU/KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KPU KOTA.

.....
 KPU/KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KPU KOTA*)

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

CONTOH :

MODEL BB-13



**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PERBAIKAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI BAKAL CALON
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)**

Pada hari ini Tanggal bulan..... Tahun dua ribu tiga belas, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota..... *) telah melakukan verifikasi perbaikan kelengkapan administrasi bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota *) dari Partai dengan daerah pemilihan sebanyak Adapun rincian berkas sebagai berikut :

1. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua atau dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris atau sebutan lainnya (Model B).
2. jumlah bakal calon untuk setiap daerah pemilihan paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi (Model BA).
3. jumlah dan persentase keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk setiap daerah pemilihan.
4. penempatan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang bakal calon perempuan dari setiap 3 (tiga) orang bakal calon.
5. kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi masing-masing bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota *) yang tidak memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia atau paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik Peserta Pemilu.
 - c. Bukti kelulusan pendidikan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, program Paket C atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
 - d. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih atau surat keterangan telah terdaftar sebagai pemilih dari Ketua PPS.
 - e. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bagi bakal calon yang telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dilampiri:
 - 1) surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana dan bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut.
 - 2) surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.
 - f. Surat Keterangan dari Dokter, Puskesmas atau Rumah Sakit pemerintah yang menerangkan kondisi kesehatan jasmani dan rohani masing-masing bakal calon.
 - g. Surat Keterangan dari dokter rumah sakit yang menerangkan kondisi bakal calon tidak terkena/bebas narkoba.
 - h. Surat Keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia.
 - i. Surat Keputusan Pemberhentian atau surat keterangan persetujuan pengunduran diri dari pejabat yang berwenang bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan

karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Penyelenggara Pemilu, DKPP, Panitia Pemilihan, Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan hasil sebagaimana terlampir dan disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk Partai Politik Peserta Pemilu;
2. Satu rangkap untuk KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota.

.....*)
KPU/KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KPU KOTA

- | | | |
|------------|---|-------|
| 1. Ketua | : | |
| 2. Anggota | : | |
| 3. Anggota | : | |
| 4. Anggota | : | |
| 5. Anggota | : | |
| 6. Anggota | : | |
| 7. Anggota | : | |

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

CONTOH :



**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTI BAKAL CALON ANGGOTA
DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)**

Pada hari ini Tanggal bulan..... Tahun dua ribu tiga belas, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota..... *) telah melakukan verifikasi perbaikan kelengkapan administrasi bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota *) terhadap :

1. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua atau dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris atau sebutan lainnya (Model B).
2. jumlah bakal calon untuk setiap daerah pemilihan paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi (Model BA).
3. jumlah dan persentase keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk setiap daerah pemilihan.
4. penempatan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang bakal calon perempuan dari setiap 3 (tiga) orang bakal calon.
5. kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota *), yaitu :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia atau paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik Peserta Pemilu.
 - c. Bukti kelulusan pendidikan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, program Paket C atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
 - d. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih atau surat keterangan telah terdaftar sebagai pemilih dari Ketua PPS.
 - e. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bagi bakal calon yang telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dilampiri:
 - 1) surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mantan narapidana dan bukti surat kabar yang memuat pernyataan tersebut.
 - 2) surat keterangan catatan kepolisian bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.
 - f. Surat Keterangan dari Dokter, Puskesmas atau Rumah Sakit pemerintah yang menerangkan kondisi kesehatan jasmani dan rohani masing-masing bakal calon.
 - g. Surat Keterangan dari dokter rumah sakit yang menerangkan kondisi bakal calon tidak terkena/bebas narkoba.
 - h. Surat Keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia.
 - i. Surat Keputusan Pemberhentian atau surat keterangan persetujuan pengunduran diri dari pejabat yang berwenang bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah,

Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Penyelenggara Pemilu, DKPP, Panitia Pemilihan, Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan hasil sebagaimana terlampir dan disampaikan kepada :

3. Satu rangkap untuk Partai Politik Peserta Pemilu;
4. Satu rangkap untuk KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota.

.....*)
KPU/KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KPU KOTA

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

MODEL BC

Contoh :



**DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN*)	KAB/KOTA/KECAMATAN*)	NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN*)
1.	Pas foto 4 x 6					1.	Pas foto 4 x 6			
2.	Pas foto 4 x 6					2.	Pas foto 4 x 6			
3.	DST.					3.	DST.			

Keterangan :

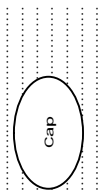
*) Coret yang tidak diperlukan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota

1. Husni Kamil Manik
2. Ida Budhiati, S.H., M.H
3. Sigit Pamungkas, S.IP., M.A
4. Ariel Budiman, S.S., S.I.P.M.B.A
5. Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.si
6. Drs. Hadar Nafis Gumay
7. Juri Ardiantoro, M.Si



MODEL BCI

Contoh :



**DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN*)	NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN*)
1.	Pas foto 4 x 6			Tanda Gambar Partai Politik (5 cm x 5 cm)	1.	Pas foto 4 x 6			Tanda Gambar Partai Politik (5 cm x 5 cm)
2.	Pas foto 4 x 6				2.	Pas foto 4 x 6			
3.	DST.				3.	DST.			

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota 5. Anggota 6. Anggota 7. Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Husni Kamil Manik 2. Ida Budhiati, S.H, M.H 3. Sigit Pamungkas, S.IP, M.A 4. Arief Budiman, S.S, S.IP, M.B.A 5. Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP, M.si 6. Drs. Hadar Nafis Gumay 7. Juri Ardiantoro, M.Si |
|--|---|



MODEL BC2

Contoh :



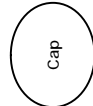
**DAFTAR CALON SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

NOMOR PARTAI		NOMOR PARTAI							
Tanda Gambar Partai Politik (5 cm x 5 cm)		Tanda Gambar Partai Politik (5 cm x 5 cm)							
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JEMIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN*)	NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JEMIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN*)
1.	Pas foto 4 x 6				1.	Pas foto 4 x 6			
2.	Pas foto 4 x 6				2.	Pas foto 4 x 6			
3.	DST.				3.	DST.			

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

- Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal
- KOMISI PEMILIHAN UMUM**
- | | |
|--|--|
| <p>1. Ketua : Husni Kamil Manik</p> <p>2. Anggota : Ida Budhiati, S.H, M.H</p> <p>3. Anggota : Sigit Pamungkas, S.IP, M.A</p> <p>4. Anggota : Arief Budiman, S.S, S.IP, M.B.A</p> <p>5. Anggota : Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP, M.si</p> <p>6. Anggota : Drs. Hadar Nafis Gumay</p> <p>7. Anggota : Juri Ardiantoro, M.Si</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |
|--|--|



MODEL BD

Contoh :



**DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

NOMOR PARTAI		NOMOR PARTAI		NOMOR PARTAI		NOMOR PARTAI			
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN*)	NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN*)
1.	Pas foto 4 x 6	Tanda Gambar Partai Politik (5 cm x 5 cm)			1.	Pas foto 4 x 6	Tanda Gambar Partai Politik (5 cm x 5 cm)		
2.	Pas foto 4 x 6				2.	Pas foto 4 x 6			
3.	DST.				3.	DST.			

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :



MODEL BDI

Contoh :



**DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN*)	NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN*)
1.	Pas foto 4 x 6	Tanda Gambar Partai Politik (5 cm x 5 cm)		Tanda Gambar Partai Politik (5 cm x 5 cm)	1.	Pas foto 4 x 6			Tanda Gambar Partai Politik (5 cm x 5 cm)
2.	Pas foto 4 x 6				2.	Pas foto 4 x 6			
3.	DST.				3.	DST.			

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :



Contoh :

MODEL BD2



**DAFTAR CALON SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

NOMOR PARTAI		NOMOR PARTAI		NOMOR PARTAI		NOMOR PARTAI			
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)	NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1.	Pas foto 4 x 6	Tanda Gambar Partai Politik (5 cm x 5 cm)			1.	Pas foto 4 x 6	Tanda Gambar Partai Politik (5 cm x 5 cm)		
2.	Pas foto 4 x 6				2.	Pas foto 4 x 6			
3.	DST.				3.	DST.			

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :



MODEL BE

Contoh :



**DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KABUPATEN/KOTA *) :

PROVINSI :

DAERAH PEMILIHAN :

NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)	NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1.	Pas foto 4 x 6				1.	Pas foto 4 x 6			
2.	Pas foto 4 x 6				2.	Pas foto 4 x 6			
3.	DST.				3.	DST.			

Keterangan :
 *) Coret yang tidak diperlukan.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

1. Ketua	:
2. Anggota	:
3. Anggota	:
4. Anggota	:
5. Anggota	:

MODEL BEI

Contoh :



**DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KABUPATEN/KOTA *) :
PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

NOMOR PARTAI		NOMOR PARTAI		NOMOR PARTAI		NOMOR PARTAI			
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)	NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1.	Pas foto 4 x 6	Tanda Gambar Partai Politik (5 cm x 5 cm)			1.	Pas foto 4 x 6			
2.	Pas foto 4 x 6	Tanda Gambar Partai Politik (5 cm x 5 cm)			2.	Pas foto 4 x 6			
3.	DST.				3.	DST.			

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

Ditetapkan di
 Pada Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

1. Ketua :
 2. Anggota :
 3. Anggota :
 4. Anggota :
 5. Anggota :

Cap

MODEL BE2

Contoh :



**DAFTAR CALON SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KABUPATEN/KOTA * :
PROVINSI :
DAERAH PEMILIHAN :

NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN*)	NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN*)
1.	Pas foto 4 x 6	Tanda Gambar Partai Politik (5 cm x 5 cm)			1.	Pas foto 4 x 6	Tanda Gambar Partai Politik (5 cm x 5 cm)		
2.	Pas foto 4 x 6				2.	Pas foto 4 x 6			
3.	DST.				3.	DST.			

Keterangan :
 *) Coret yang tidak diperlukan.

Ditetapkan di
 Pada Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

- 1. Ketua :
- 2. Anggota :
- 3. Anggota :
- 4. Anggota :
- 5. Anggota :



LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 07 TAHUN 2013
TENTANG
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

JUMLAH KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PENGAJUAN
DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
DI SETIAP DAERAH PEMILIHAN

JUMLAH PENGAJUAN CALON	SEKURANG-KURANGNYA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN
1 orang	0 orang
2 orang	1 orang
3 orang	1 orang
4 orang	2 orang
5 orang	2 orang
6 orang	2 orang
7 orang	3 orang
8 orang	3 orang
9 orang	3 orang
10 orang	4 orang
11 orang	4 orang
12 orang	4 orang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

LAMPIRAN II.1
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 07 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

**PENEMPATAN BAKAL CALON PEREMPUAN PADA DAERAH PEMILIHAN DENGAN
 ALOKASI 3 KURSI**

NO URUT	PAS FOTO	NAMA CALON	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	...	Nama calon perempuan	MEMENUHI SYARAT
2	...	Nama calon laki-laki	
3	...	Nama calon laki-laki	

NO URUT	PAS FOTO	NAMA CALON	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	...	Nama calon laki-laki	MEMENUHI SYARAT
2	...	Nama calon perempuan	
3	...	Nama calon laki-laki	

NO URUT	PAS FOTO	NAMA CALON	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	...	Nama calon laki-laki	MEMENUHI SYARAT
2	...	Nama calon laki-laki	
3	...	Nama calon perempuan	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

LAMPIRAN II.2
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 07 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

CONTOH

PENEMPATAN BAKAL CALON PEREMPUAN PADA DAERAH PEMILIHAN DENGAN
 ALOKASI 6 KURSI

NO URUT	PAS FOTO	NAMA CALON	KETERANGAN
1	2	3	4
1	...	Nama calon perempuan	MEMENUHI SYARAT
2	...	Nama calon laki-laki	
3	...	Nama calon laki-laki	
4	...	Nama calon laki-laki	
5	...	Nama calon perempuan	
6	...	Nama calon laki-laki	

NO URUT	PAS FOTO	NAMA CALON	KETERANGAN
1	2	3	4
1	...	Nama calon perempuan	MEMENUHI SYARAT
2	...	Nama calon perempuan	
3	...	Nama calon laki-laki	
4	...	Nama calon laki-laki	
5	...	Nama calon laki-laki	
6	...	Nama calon laki-laki	

NO URUT	PAS FOTO	NAMA CALON	KETERANGAN
1	2	3	4
1	...	Nama calon laki-laki	MEMENUHI SYARAT
2	...	Nama calon laki-laki	
3	...	Nama calon perempuan	
4	...	Nama calon laki-laki	
5	...	Nama calon laki-laki	
6	...	Nama calon perempuan	

NO URUT	PAS FOTO	NAMA CALON	KETERANGAN
1	2	3	4
1	...	Nama calon laki-laki	TIDAK MEMENUHI SYARAT
2	...	Nama calon laki-laki	
3	...	Nama calon laki-laki	
4	...	Nama calon perempuan	
5	...	Nama calon perempuan	
6	...	Nama calon laki-laki	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

LAMPIRAN II.3
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 07 TAHUN 2013
TENTANG
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

CONTOH
 PENEMPATAN BAKAL CALON PEREMPUAN PADA DAERAH PEMILIHAN DENGAN
 ALOKASI 9 KURSI DST

NO URUT	PAS FOTO	NAMA CALON	KETERANGAN
1	2	3	4
1	...	Nama calon perempuan	MEMENUHI SYARAT
2	...	Nama calon laki-laki	
3	...	Nama calon laki-laki	
4	...	Nama calon laki-laki	
5	...	Nama calon perempuan	
6	...	Nama calon laki-laki	
7	...	Nama calon laki-laki	
8	...	Nama calon laki-laki	
9	...	Nama calon perempuan	

NO URUT	PAS FOTO	NAMA CALON	KETERANGAN
1	2	3	4
1	...	Nama calon perempuan	MEMENUHI SYARAT
2	...	Nama calon perempuan	
3	...	Nama calon perempuan	
4	...	Nama calon laki-laki	
5	...	Nama calon laki-laki	
6	...	Nama calon laki-laki	
7	...	Nama calon laki-laki	
8	...	Nama calon laki-laki	
9	...	Nama calon laki-laki	

NO URUT	PAS FOTO	NAMA CALON	KETERANGAN
1	2	3	4
1	...	Nama calon perempuan	MEMENUHI SYARAT
2	...	Nama calon perempuan	
3	...	Nama calon laki-laki	
4	...	Nama calon perempuan	
5	...	Nama calon laki-laki	
6	...	Nama calon laki-laki	
7	...	Nama calon laki-laki	
8	...	Nama calon laki-laki	
9	...	Nama calon laki-laki	

NO URUT	PAS FOTO	NAMA CALON	KETERANGAN
1	2	3	4
1	...	Nama calon laki-laki	MEMENUHI SYARAT
2	...	Nama calon laki-laki	
3	...	Nama calon perempuan	
4	...	Nama calon laki-laki	
5	...	Nama calon laki-laki	
6	...	Nama calon perempuan	
7	...	Nama calon laki-laki	
8	...	Nama calon laki-laki	
9	...	Nama calon perempuan	

NO URUT	PAS FOTO	NAMA CALON	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	...	Nama calon laki-laki	TIDAK MEMENUHI SYARAT
2	...	Nama calon laki-laki	
3	...	Nama calon laki-laki	
4	...	Nama calon perempuan	
5	...	Nama calon perempuan	
6	...	Nama calon perempuan	
7	...	Nama calon laki-laki	
8	...	Nama calon laki-laki	
9	...	Nama calon laki-laki	

NO URUT	PAS FOTO	NAMA CALON	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	...	Nama calon laki-laki	TIDAK MEMENUHI SYARAT
2	...	Nama calon laki-laki	
3	...	Nama calon laki-laki	
4	...	Nama calon laki-laki	
5	...	Nama calon laki-laki	
6	...	Nama calon laki-laki	
7	...	Nama calon perempuan	
8	...	Nama calon perempuan	
9	...	Nama calon perempuan	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK